

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis lingkungan global dalam dua dekade terakhir semakin buruk, khususnya terjadi kerusakan pada ekosistem laut, punahnya berbagai jenis makhluk hidup, penyebaran sampah plastik di lautan, serta tekanan besar terhadap sumber daya di sepanjang wilayah pesisir yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak terkendali (Hausknost & Hammond, 2012). Laut adalah kekayaan bersama yang dimiliki oleh seluruh dunia, tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan sebagai penopang kehidupan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar serta berpengaruh besar dalam hubungan antar negara (Nabilla & Anggriani, 2024).

Dalam mengelola lingkungan secara global, laut menjadi tempat berkumpulnya berbagai pihak, seperti negara, organisasi non-negara, serta lembaga internasional yang saling terhubung dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya laut (Blythe et al., 2021; Chasek & Downie, 2021). Topik kelautan kini tidak hanya dilihat sebagai masalah lingkungan teknis saja, tetapi juga dianggap sebagai isu strategis yang terkait dengan keamanan, ekonomi, serta hubungan antar negara di tingkat internasional. Perubahan cara berpikir ini mendorong munculnya berbagai upaya internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menggabungkan isu lingkungan dalam rencana pembangunan dunia.

Menyikapi krisis global tersebut, perubahan ini membuat cara berpikir tentang tugas pemerintah dalam mengurus sumber daya alam dan lingkungan hidup berubah. Dalam buku-buku tentang hubungan internasional yang lama, negara-negara digambarkan sebagai pihak yang berpikir dengan logika dan lebih mengutamakan kepentingan negara sendiri, terutama dalam hal keamanan dan ekonomi, tanpa terlalu memperhatikan akibat yang timbul bagi lingkungan dari kebijakan yang mereka terapkan (Biermann et al., 2009; Colding & Folke, 2003). Namun, baru-baru ini, kemampuan sebuah negara semakin menjadi penentu utama dalam menghadapi berbagai krisis global, seperti krisis lingkungan hidup yang tidak mengenal batas negara (Biermann et al., 2009; Delgado et al., 2015).

Negara yang tidak berkomitmen menjaga lingkungan bisa mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari aturan dan pengakuan internasional yang semakin memperhatikan masalah lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, konsep *Green State* sangat penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana sebuah negara bisa menjadi pelaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep ini memberi jalan bagi negara untuk tetap *up-to-date* di tengah tuntutan dunia terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Pandangan *Green State* yang diusulkan oleh Robyn Eckersley dalam bukunya *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty* menunjukkan bahwa norma keberlanjutan global, seperti SDGs, bisa menjadi sumber legitimasi baru yang

mengubah cara pemerintah memandang negara. Dalam pandangan ini, perhatian negara tidak lagi hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi berpindah ke arah keberlanjutan ekologis yang lebih luas (Eckersley, 2004). Transformasi ini tidak hanya dipicu dari luar, tapi juga menjadi proses sosial yang mengubah kembali identitas negara sebagai pihak yang peduli terhadap lingkungan dalam sistem internasional. Pada kerangka *Green State*, berhasilnya transformasi tersebut bergantung pada seberapa dalam norma global tersebut tidak hanya diucapkan secara retorik, tetapi diimplementasikan dalam struktur konstitusional, kebijakan publik, dan praktik pemerintahan di dalam negeri secara konsisten (Eckersley, 2004). Perubahan menuju negara yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses membentuk identitas lingkungan yang terjadi karena adanya tekanan dari norma global serta perubahan sistem di tingkat negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, konsep *Green State* tidak hanya penting dalam menganalisis kebijakan lingkungan di tingkat negara, tetapi juga membantu memahami bagaimana komitmen global diubah menjadi tindakan nyata di tingkat daerah dan sub-nasional.

Dalam konteks penerapan norma global ini, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki lautan yang sangat luas, sehingga negara ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya laut secara global. Identitas Indonesia sebagai negara maritim membuat pengelolaan laut menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri dan citra di mata dunia, terutama dalam mengenai komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan (Blythe et al.,

2021). Kedua, laut merupakan milik seluruh dunia dan memiliki dampak geopolitik serta ekonomi yang melebihi batas negara, sehingga diperlukan kerja sama internasional dalam mengelolanya secara efektif. Ketiga, pencapaian tujuan SDGs 14 (*Life Below Water*) berdampak langsung pada reputasi negara dalam konteks penerapan kebijakan lingkungan global dan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (Blythe et al., 2021). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peran penting untuk menunjukkan komitmen dalam melindungi ekosistem laut, bukan hanya demi kepentingan dalam negeri, tetapi juga untuk mempertahankan posisi Indonesia di tingkat internasional.

Meskipun demikian, dalam kerangka teori Eckersley (2004), negara berkelanjutan atau *Green State* mengharuskan adanya penerapan prinsip ekologis secara menyeluruh dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan pembangunan negara. Ini termasuk kemampuan untuk mengurangi kepentingan ekonomi jangka pendek agar bisa mendukung keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Realitas pengelolaan lingkungan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekstraksi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kerusakan di daerah pesisir, adanya konflik dalam penggunaan lahan di laut, serta masalah dalam penerapan hukum terhadap praktik eksploitasi sumber daya laut yang merusak lingkungan (Adiyanto et al., 2025; Dryzek, 1998).

Namun, Indonesia juga sudah menunjukkan kemajuan dalam berkomitmen untuk lingkungan melalui beberapa kebijakan, seperti menetapkan kawasan konservasi perairan, ikut serta dalam perjanjian lingkungan internasional, serta mengintegrasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi ini menjadi hambatan utama dalam upaya menuju *Green State*, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian tentang pengelolaan ekosistem laut di tingkat lokal menjadi penting untuk melihat sejauh mana komitmen nasional terhadap keberlanjutan telah diimplementasikan di lapangan.

Oleh karena itu, dari segi hubungan internasional, cara mengelola wilayah pesisir di tingkat lokal tidak bisa dipisahkan dari perubahan dan keadaan global yang lebih luas, yang melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. Norma internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) 14 mendorong pemerintah negara-negara untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam mengelola ekosistem perairan serta mendorong terbentuknya sistem pengelolaan laut yang lebih baik (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, wilayah lokal seperti Desa Teluk Bakau di bagian timur Bintan bisa diartikan sebagai tempat pelaksanaan yang potensial dari komitmen global tersebut, di mana kebijakan dan cara mengelola lingkungan di tingkat daerah menjadi acuan untuk mengetahui sejauh mana aturan internasional diserap dalam pemerintahan di tingkat lokal (Blythe et al., 2021). Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir di bagian timur Bintan belum diasumsikan sepenuhnya mencerminkan

prinsip *Green State*, melainkan dianggap sebagai bahan analisis untuk mengetahui sejauh mana prinsip tersebut telah diterapkan dalam praktik pengelolaan sumber daya perairan. Ini menunjukkan bahwa peran dari tingkat lokal sangat penting dalam menentukan apakah sebuah negara bisa disebut sebagai *Green State* dalam sistem internasional, karena kebijakan lingkungan pada akhirnya dijalankan di tingkat daerah (Larsen & Jackson, 2025). Penelitian di tingkat lokal seperti ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perubahan lingkungan di sebuah negara.

Sebagai salah satu cerminan di tingkat lokal, Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan. Dengan ratusan pulau dan luas lautan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daratan, Bintan menjadi salah satu daerah dengan sifat maritim yang menonjol di Indonesia (Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2026). Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, ekonomi daerah ini ditopang oleh beberapa sektor utama, termasuk industri manufaktur, pariwisata, perikanan, serta konstruksi yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sektor pariwisata juga mengalami perkembangan pesat berkat adanya area unggulan seperti Lagoi yang telah diakui sebagai destinasi wisata kelas dunia, serta menjadi salah satu pendorong utama ekonomi lokal (Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2026). Selain aspek ekonomi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan juga

menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kelautan, pengembangan ekonomi masyarakat di pesisir, serta perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2021).

Namun pada pelaksanaannya, kebijakan pembangunan daerah saat ini menekankan pada pengembangan sektor kelautan dan prinsip keberlanjutan, sebagai bagian dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2021). Namun di lapangan, pertumbuhan kegiatan wisata dan pemanfaatan ruang pesisir yang terus meningkat secara alami memerlukan pengawasan dan penerapan kebijakan yang tetap konsisten agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip keberlanjutan. Aktivitas berwisata di laut, pengelolaan sampah, penggunaan perairan dangkal, dan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata biasanya dilakukan di lokasi dan waktu yang sama, tetapi antar pihak yang terlibat tidak ada koordinasi yang cukup. Kondisi ini membutuhkan pengelolaan yang mampu memastikan bahwa penggunaan sumber daya ekonomi tidak melebihi kemampuan lingkungan dalam menjaga layanan ekosistem secara berkelanjutan. Fenomena ini tidak terjadi sendirian, melainkan bagian dari proses yang lebih besar, yang berkaitan dengan kesulitan dalam menjaga dan mengelola ekosistem laut. Kesulitan ini juga terjadi di tingkat daerah hingga global, sehingga diperlukan pendekatan yang luas dan melibatkan banyak pihak.

Tantangan pengelolaan tersebut sangat terasa di beberapa titik strategis, di mana wilayah pesisir bagian timur Pulau Bintan adalah salah satu daerah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, berfokus pada sektor kelautan dan pariwisata dalam dua puluh tahun terakhir. Merujuk pada laporan resmi Kabupaten Bintan Dalam Angka 2026, Kecamatan Gunung Kijang termasuk dalam wilayah pesisir yang menunjukkan potensi pengembangan sumber daya kelautan dan pariwisata yang terus meningkat sebagai elemen integral dalam struktur ekonomi daerah (Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2026). Area ini terkenal dengan keindahan alamnya yang mencakup pantai berpasir putih, hutan mangrove yang luas, dan Padang Lamun yang menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut yang penting baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Eksistensi ekosistem ini tak hanya memberikan manfaat ekologis sebagai penopang kehidupan di kawasan pesisir, namun juga berfungsi sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional yang mendambakan pengalaman wisata bahari yang unik (Jusniaty et al., 2025). Pertumbuhan ini menjadikan wilayah pesisir timur Bintan sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan yang perlu dikelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan.

Untuk melindungi kawasan rentan tersebut, wilayah perairan di bagian timur Pulau Bintan termasuk dalam Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan, yang merupakan kawasan konservasi perairan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 dengan luas sebesar 138.561 hektare

(DKP Kepri, 2026a). Kawasan Konservasi ini terdiri dari 23 zona inti dengan total luas 2.101,87 hektare, zona pemanfaatan terbatas seluas 135.969,63 hektare, dan zona lainnya yang mencapai 489,93 hektare, masing-masing memiliki fungsi dan tujuan berbeda dalam pengelolaan (SUOP TWP Timur Pulau Bintan, 2024).

Penetapan kawasan konservasi ini adalah langkah signifikan dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayati laut sekaligus memberikan ruang untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Kawasan ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di jalur Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, serta Berdekatan dengan Singapura, yang menjadi pusat bisnis dan pariwisata internasional. Keindahan di bawah laut, pemandangan Pulau Bintan dan pulau-pulau kecil lainnya, serta kekhasan budaya dan sejarah Melayu yang ada di Bintan adalah daya tarik yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata yang berbasis konservasi (SUOP TWP Timur Pulau Bintan, 2024). Di dalam kawasan konservasi tersebut, ekosistem Padang Lamun di area TWP Timur Pulau Bintan mencakup sekitar 2.416 hektare dan memiliki peranan yang krusial sebagai habitat bagi berbagai spesies laut yang dilindungi serta yang memiliki nilai ekonomi (SUOP TWP Timur Pulau Bintan, 2024).

Penelitian mengenai sistem sosial-ekologi ekosistem lamun di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan ekosistem ini sejak tahun 1970-an, menjadikannya sebagai sumber penghidupan bagi nelayan tradisional,

produsen kerupuk, serta pelaku dalam sektor pariwisata (Sjafrie, 2021). Ekosistem lamun memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada masyarakat pesisir melalui penyediaan jasa ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang semakin meningkat dengan berkembangnya industri pariwisata di wilayah tersebut. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata juga menimbulkan tekanan terhadap ekosistem lamun, sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat dan berkelanjutan.

Lebih mengerucut lagi pada area yang paling terdampak, di antara desa-desa yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Gunung Kijang, terdapat beberapa desa yang tergolong dalam kawasan TWP Timur Pulau Bintan, masing-masing dengan karakteristik dan potensi yang bervariasi. Salah satu desa tersebut adalah Desa Teluk Bakau, yang berfungsi sebagai area yang mengintegrasikan aspek ekologis dan ekonomi. Lokasi desa ini sangat strategis, berada di pusat ekosistem lamun dan mangrove yang memainkan peranan penting dalam perlindungan pesisir, sebagai tempat hidup biota laut, serta untuk keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata bahari (DKP Kepri, 2026b). Desa ini menjadi salah satu titik fokus dalam berbagai inisiatif konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir berkat potensi yang dimiliki. Pengakuan atas potensi Desa Teluk Bakau terlihat dari penetapannya sebagai Kampung Nelayan Maju (KALAJU) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2022, yang merupakan program proyek percontohan bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penataan lingkungan serta dukungan terhadap sarana dan prasarana perikanan (infokepri.com, 2022).

Di kawasan yang potensial ini, pertumbuhan jumlah pengunjung, pembangunan akomodasi yang sederhana, serta meningkatnya usaha yang mendukung pariwisata mencerminkan peranan signifikan kawasan ini terhadap ekonomi desa dan wilayah sekitarnya. Aktivitas tersebut berjalan seiring dengan keberadaan ekosistem pesisir yang rentan, seperti perairan dangkal, terumbu karang, dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan pesisir, sehingga memerlukan pengelolaan yang teliti.

Dalam situasi ini, pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir timur Bintan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga terkait dengan upaya untuk menjaga kualitas lingkungan dalam jangka panjang (Jusniaty et al., 2025). Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata secara bertahap menjadikan pengelolaan ekosistem laut sebagai isu yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan kawasan pesisir timur Bintan. Urgensi untuk melindungi ekosistem yang merupakan daya tarik utama pariwisata semakin mendesak, mengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat mengurangi nilai ekonomi kawasan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan ekologi jangka panjang melalui kebijakan yang terintegrasi dan partisipatif sangatlah diperlukan.

Terkait dengan pendekatan partisipatif tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bersama berbagai pihak terkait telah menjalankan beberapa program konservasi, seperti pengembangan wisata edukasi berbasis konservasi, pemantauan ekosistem lamun bersama masyarakat setempat, serta peningkatan kemampuan lembaga dalam mengelola area konservasi berbasis OECM (*Other Effective Area-Based Conservation Measures*), sebagai bagian dari pengelolaan kawasan konservasi (DKP Kepri, 2026a). Pelatihan tentang pemantauan ekosistem lamun telah dilakukan kepada ratusan anggota kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dari enam kelompok lokal di TWP Timur Pulau Bintan, dengan bantuan dari DKP Kepri, Konservasi Indonesia, BRIN, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bentuk kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat (SUOP TWP Timur Pulau Bintan, 2024).

Upaya memperkuat pengelolaan lingkungan di tingkat desa juga terlihat dari proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan sampah berbasis perlindungan ekosistem pesisir di Desa Teluk Bakau. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya (DKP Kepri, 2026b). Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar berupaya keras untuk mengelola kawasan konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat

sekitar dengan cara yang melibatkan masyarakat secara langsung dan berdasarkan kebutuhan komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut di Bintan Timur telah dilakukan secara berkelanjutan serta sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 14 dan konsep *Green State* yang diajukan oleh Robyn Eckersley. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan ekosistem pesisir, pengendalian kerusakan lingkungan laut, serta keseimbangan antara penggunaan sumber daya laut untuk kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan (Eckersley, 2004; United Nations, 2015). Dalam penelitian ini, konsep *Green State* tidak hanya dianggap sebagai kerangka aturan, tetapi juga digunakan sebagai indikator yang bisa dianalisis secara nyata di lapangan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan secara teratur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan seberapa jauh komitmen Indonesia terhadap lingkungan yang sudah diterapkan di tingkat daerah, terutama di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Penelitian ini bisa membantu memajukan pelajaran tentang hubungan antar negara serta membantu membuat kebijakan yang lebih baik untuk mengelola daerah pesisir di masa depan.

Dengan demikian, konsep *Green State* dalam penelitian ini bukan hanya dipakai sebagai ide teoritis, tetapi juga dijadikan cara untuk menganalisis secara nyata

bagaimana ekosistem laut di Timur Bintan dikelola dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lengkap mengenai sejauh mana prinsip-prinsip *Green State* telah diterapkan dalam mengelola kawasan konservasi di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan di wilayah Timur Bintan sudah sesuai dengan konsep *Green State*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai pengelolaan ekosistem laut di Bintan sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep *Green State*, dengan tujuan khusus seperti berikut:

- a. Mengidentifikasi bentuk perlindungan serta pengelolaan ekosistem laut yang diterapkan di wilayah Timur Bintan, baik oleh pemerintah daerah maupun aktor terkait lainnya.
- b. Menganalisis pengelolaan ekosistem laut di wilayah Timur Bintan, khususnya dalam aspek keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab negara, dan komitmen terhadap konservasi ekosistem laut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang hubungan internasional, khususnya dalam menganalisis pengelolaan lingkungan global serta konsep *Green State*. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menguji seberapa relevan teori *Green State* yang diajukan oleh Robyn Eckersley pada tahun 2004 dalam konteks penerapan norma global SDGs 14 di tingkat sub-nasional. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah negara yang fokus pada lingkungan tidak hanya tergantung pada komitmen resmi di tingkat nasional, tetapi juga pada tindakan nyata yang dilakukan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini membantu menghubungkan kembali literatur tentang tata kelola lingkungan di tingkat global dengan pelaksanaan kebijakan dalam negeri dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi penelitian akademik dalam memahami cara norma internasional dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan tindakan lingkungan di negara-negara yang sedang berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Bintan, terutama dalam mengelola area pesisir timur Bintan agar lebih sesuai dengan tujuan SDGs 14. Penelitian ini juga bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada ilmu akademik mengenai penguatan

konservasi ekosistem laut, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan pariwisata laut yang dapat berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan kelautan yang diterapkan di tingkat sub-nasional. Penelitian ini bisa membantu masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata untuk lebih mengerti pentingnya memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang tepat, sehingga tidak merugikan ekosistem laut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi tolak ukur untuk memperkuat penerapan prinsip *Green State* melalui kebijakan dan tindakan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

